

=

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2018. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2018 merupakan gambaran perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang selama Tahun 2018 yang disusun dan disampaikan secara sistematis.

Pada tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, untuk itu telah diambil berbagai kebijakan guna mewujudkan sasaran yang akan dicapai. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang diukur kinerjanya dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya dalam beberapa indikator kinerja meliputi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) Tahun 2018 ini masih jauh dari sempurna untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan laporan ini.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG



Drs. NUGROHO BUDI RAHARJO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610821 198903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. TUJUAN DAN MANFAAT	7
D. PERMASALAHAN DAN ISSU STRATEGIS.....	7
E. SISTIMATIKA PENYAJIAN	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	25
B. REALISASI ANGGARAN	38
BAB IV PENUTUP	44
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2018 disusun sebagai bagian dari perwujudan pertanggungjawaban instansi Pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi organisasi dan sebagai tolok ukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2018.

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang ingin mewujudkan Misi ke 6 Kabupaten Pemalang yakni Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum, kemudahan investasi dan daya saing daerah.

Pada tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menetapkan 7 sasaran. Pencapaian ke 7 sasaran ini tercermin dalam indikator-indikator sasaran beserta target dan realisasinya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja 11 sasaran tersebut adalah sebesar 74,5%. Secara rincian tingkat capaian kinerja seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	
2.	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik	67%
3.	Memperkuat kualitas aparat komunikasi dan informatika	84%
4	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	72%
5.	Membangun citra positif Pemerintah Kabupaten	70%

	Pemalang di mata publik	
6.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	64%
7.	Terintegrasinya data (interoperabilitas system informasi antar seluruh SKPD/OPD	90%

Hasil analisis tingkat capaian kinerja menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam kategori **cukup baik**. Tetapi walaupun hasil capaian kinerja tersebut dalam kategori baik, namun hasil analisa efektivitas dan efisiensi dari sasaran program masih belum sepenuhnya dapat memberikan hasil yang diharapkan. Berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang antara lain:

A. Permasalahan yang dihadapi

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Koneksi G2G

- a. Antar OPD belum terintegrasi baik dalam hal aplikasi data maupun jaringan interkoneksi
- b. Format data pada aplikasi di OPD belum sama sehingga sulit dilakukan interoperability

2. Koneksi G To netizen/ bisnis

- a. fasilitas wifi gratis di RTH atau area publik belum menyuluruh di masing2 kecamatan
- b. kurangnya ketrampilan masyarakat /netizen dan melakukan pelayanan , komplain transaksi dan informasi secara online

3. Belum semua OPD menitipkan server di data center baru 33%
4. Banyak sistem elektronik yang berplatform (Operating System, Database) yang berbeda sehingga membutuhkan partisipasi dan kolaborasi OPD untuk mewujudkan Integrasi sistem
5. Kurangnya SDM yang Menguasai teknis programming Networking untuk maintenance sistem elektronik dan infrastruktur komputer
6. Kurangnya SDM PNS pada bidang Jurnalistik dan penyiaran

2. Urusan Persandian

1. Kurangnya SDM PNS dibidang keamanan Siber dan Persandian
2. Kurangnya sarana ruangan yang standar keamanan informasi
3. Kurangnya kesadaran aparat pemerintah di bidang Keamanan Siber

3. Urusan Statistik

1. Kurangnya SDM bidang Statistik yang memadai
2. Kurangnya Pemahaman OPD mengenai Statistik Sektoral

B. SOLUSI YANG DI LAKUKAN

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. mengintensifkan rapat koordinasi pemangku sistem elektronik / OPD untuk mewujudkan integrasi sistem
2. melalui konversi data bagi data yang telah terbangun dan penyamaan data pada periode berikutnya (dengan MY SQL)
3. pertemuan tehknis PIC Walidata dari masing-masing OPD guna penyamaan persepsi dengan melalui ekspor dan impor data

4. Kecamatan yang belum siap RTH dibuat Area wifi di setiap kantor kecamatan atau area public dan pelatihan bagi masyarakat berbasis cluster atas komunitas
5. Interoperability data ditingkatkan dan dipusatkan ke Diskominfo serta disiapkan co locationnya
6. Bekerjasama dengan provider Telekomunikasi untuk merecovery area yang blank spot dan Intensitaskan rapat koordinasi pemangku sistem elektronik / OPD untuk mewujudkan integrasi sistem
7. Peningkatan,Kapasitas SDM guna memenuhi standar kompetensi SDM yang di butuhkan
8. Mengoptimalkan tenaga non PNS (Honoror)

2. Urusan Persandian

1. Pengusulan Formasi PNS untuk JFT Sandiman
2. Pengusulan penambahan bangunan ruangan yang memenuhi standar keamanan informasi
3. Pengusulan Bimtek / Pelatihan / sandiman dibidang keamanan sandiman

3. Urusan Statistik

1. mengirim personil mengikuti Bimtek statistik guna meningkatkan kapasitas SDM
- 2, Menyelenggarakan Sosialisasi/Bimtek dan Rakor tentang Statistik Sektoral dengan peserta OPD

Dengan berbagai langkah antisipasi seperti tersebut di atas, diharapkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya tahun yang akan datang lebih baik seperti yang diharapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. KEDUDUKAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Sibolang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Sibolang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Sibolang

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Sibolang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Sibolang, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik,

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Sibolang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Sibolang pada Bagian Ketiga, menyebutkan bahwa Susunan Organisasi Dinas, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat terdiri dari
 1. Subbagian Bina Program dan Keuangan,
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian,
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari
 1. Seksi Informasi Publik,
 2. Seksi Komunikasi Publik,

- d. Bidang Penyelenggaraan *E-Government* terdiri dari
 - 1. Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government*,
 - 2. Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government*,
- e. Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik terdiri dari
 - 1. Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian;
 - 2. Seksi Statistik,
- f. UPTD,
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Pelaksanaan tugas sehari-hari perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Kondisi kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya sampai dengan akhir bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut :

1. Perincian berdasarkan jumlah personil :

NO	INSTANSI	JUMLAH
1	2	3
1.	Kepala Dinas	1 orang
2.	Sekretaris	1 orang
3.	Kepala Bidang	3 orang
4.	Kepala Subbagian/Seksi	8 orang
5.	Pelaksana	31 orang
Jumlah		44 orang

2. Perincian Berdasarkan Pendidikan

NO.	INSTANSI	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	SARMUD	S1	S2	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	-	-	1	1
3.	Kepala Bidang	-	-	-	-	3	-	3
4.	Kepala Seksi	-	-	1	-	7	-	8

5.	Pelaksana	-	-	19	2	10	-	31
Jumlah		-	-	20	2	20	2	44

3. Perincian Berdasarkan Golongan Ruang

NO.	INSTANSI GOLONGAN	GOL. RUANG				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	1
3.	Kepala Bidang	-	-	1	2	3
4.	Kepala Seksi	-	-	8	-	8
5.	Pelaksana		14	18	-	32
Jumlah			14	27	4	45

3. SARANA DAN PRASARANA

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :

No	Jenis	Jumlah
1	Komputer PC	155 unit
2	Laptop	55 unit
3	LCD/proyektor attachment	9 unit
4	Telepon	5 unit
5	Televisi	12
6	AC unit	24
7	AC Split	11
8	Almari besi	5
9	Almari kaca	4
10	Almari kayu	4
11	Meja Kerja Eselon II	1
12	Meja Kerja pejabat lainnya	3
13	Meja Rapat	22
14	Meja Tulis	16
15	Meja telephone	1
16	Meja Resepsionis	3
17	Meja Komputer	49

18	Meja biro	57
19	Meja Operator	2
20	Meja tamu eselon II	1
21	Meja tamu eselon III	4
22	Kursi besi (metal)	13
23	Kursi kayu bambu	11
24	Kursi Rapat	44
25	Kursi tangan	13
26	Kursi putar	8
27	Kursi biasa	74
28	Kursi lipat	10
29	Genset	2
30	Mesin bor lainnya	1
31	Avometer SU	2
32	Mesin Tik manual	7
33	Mesin fotokopi	1
34	Rak besi (metal)	4
35	Rak kayu	4
36	Filling Cabinet	27
37	Kendaraan Roda-4 (stasiun wagon)	9
38	Kendaraan Roda-2	16
39	Brankas	1
40	Papan Visual	1
42	Alat Penghancur kertas	2
43	Papan Tulis	5
44	White board	3
45	Mesin absensi	161
46	Overhead Proyektor	1
47	Alat kantor lainnya	9
48	Zice	2
49	Sofa	2
50	Jam mekanis	1
51	Lemari es	2
52	Kipas angin	4
53	Kompor gas	1
54	Amplifier	2
55	Loudspeaker	6

56	Sound Sistem	1
57	Wireless	3
58	Mikropone	4
59	Step Up/Down	2
60	Kamera video	6
61	Kamera Film	2
62	Tustel	9
63	Kaca hias	1
64	Dispenser	5
65	Mimbar / Podium	3
66	Handy cam	3
67	Alat rumah tangga lainnya	6
68	Alat pemadam portable	2
69	Local area network (LAN)	1
70	Internet	2
71	Card reader	94
72	Hard disk	7
73	Peralatan komputer mainframe lainnya	2
74	Printer	82
75	Scanner	3
76	Monitor	7
77	Peralatan personil computer lainnya	6
78	Server	9
79	Router	1
80	HUB	3
81	Peralatan jaringan lainnya	44
82	Meja kerja pegawai non struktural	3
83	Compact disk player	3
84	Disk record player	5
85	Headphone	38
86	Microphone wireless/mic	2
87	Unintemuptible power supply (UPS)	2
88	Battery charger	4
89	Enconder/decorder	1
90	Audio cassette recorder	2
91	Digital audio tape recorder	2
92	Peralatan studio visual lain-lain	18

93	Peralatan studio video dan film lainnya	52
94	Camera elektronik	4
95	Video tape recorder stationer	1
96	Video mixer	1
97	Video switcher	1
98	Tripod camera	5
99	Lighting stand tripod	1
100	Film projector	2
101	Camera film	4
102	Lensa camera	2
103	Mixer PRC	1
104	Layar film	1
105	Lighting head body	4
106	Camera vertical	1
107	Handphone	11
108	Alat komunikasi lainnya	4
109	Megaphone	2
110	Handy talking	4
111	Unit transceiver stationary	2
112	Alat komunikasi radio HF/FM	24
113	Unit transceiver UHV portable	30
114	Alat komunikasi social lainnya	1
115	Unit pemancar VHF/FM stationary	1
116	Alat pemancar VHF/FM lainnya	1
117	Antena VHF/FM portable	1
118	Switcher/menara antenna lainnya	2
119	Bangunan gedung kantor permanen	3
120	Bangunan gedung kantor lainnya	5
121	Bangunan pagar keliling	1
122	Bangunan menara telekomunikasi lain-lain	12
123	Instalasi penangkal petir manual	1
124	Perangkat lunak sistem operasional	15
	Kamera drone	
125	Camera	22
126	Soil Stabilizer	18
127	Meja Kayu	1
128	Lemari Sorok	1

129	Meja Bunder	1
130	Mesin penghisap debu	1
131	Kitchen Set	1
132	Peralatan jaringan lainnya	28
133	Kursi hadap depan meja pimpinan	2
134	Lemari buku untuk perpustakaan	2
135	Alat keamanan Lainnya	3
136	Countainment Boxes ((Single)	133

B. TUJUAN DAN MANFAAT LKJiP

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2018 disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan atas kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah serta kewenangan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2018 ini dapat bermanfaat untuk :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

D. PERMASALAHAN DAN ISSU STRATEGIS

Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. belum meratanya akses masyarakat terhadap informasi;

- b. masih kurangnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika;
- c. belum meratanya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat terhadap teknologi informasi.
- d. belum adanya regulasi pengembangan E-Government Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya
- e. belum terintegrasinya data sistem elektronik Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya
- f. belum terintegrasinya pengelolaan aplikasi di lingkungan SKPD/OPD Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya

2. Urusan Persandian

- a. Masih kurangnya kesadaran keamanan informasi pejabat negara dan Aparatur Sipil Negara;
- b. Adanya kerawanan dan ancaman perusakan sistem komunikasi elektronik, aplikasi server dan data center;
- c. Adanya kerawanan dan ancaman keamanan jaringan komunikasi pejabat negara dan OPD Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya
- d. Terbatasnya fasilitas peralatan persandian.

3. Urusan Statistik

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat arti pentingnya data;
- b. Terbatasnya/sulitnya akses data pembangunan;
- c. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data statistik sektoral.

Mengacu kepada tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya, mempertimbangkan kekuatan, peluang, kelemahan, serta tantangan yang dihadapi, maka terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi antara lain :

1. Menerapkan tata kelola E Government dan Pelayanan Informasi Publik.

E Government merupakan komitmen nasional, pelayanan informasi publik juga merupakan kewajiban sebagaimana di atur dalam UU Keterbukaan Informasi. Tata Kelola E Government dan Pelayanan Informasi Publik memerlukan regulasi dan SOP agar operasional dan menjadi acuan bagi setiap aparatur di SKPD/OPD. Kabupaten Pematang Jaya belum memiliki *Road Map* (Peta Jalan) tentang Penyelenggaraan *E-Government*, sehingga perlu disusun *Road Map E-Government*. Sedangkan terkait dengan Pelayanan Informasi Publik, regulasi yang sudah ada perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru (mutakhir).

2. **Mengintegrasikan data TIK dan data pelayanan publik.**

Rintisan program E Government dan pelayanan publik, merupakan keniscayaan untuk diintegrasikan dalam pusat data. Data yang terintegrasi akan memudahkan bagi stake holder untuk mengakses data. Hal serupa juga dalam pelayanan informasi publik. Oleh karena itu, perlu interoperabilitas SIM di setiap SKPD/OPD, interkoneksi jaringan dan web site setiap SKPD, up dating data publik terkait proses perencanaan, anggaran, perkembangan di setiap tahapan serta monitoring hasil akhir kegiatan pembangunan. Apabila konsisten dilaksanakan, dengan sendirinya akan meningkatkan Pelayanan Publik.

3. **Membangun infrastruktur jaringan TIK dan komunikasi publik.**

Untuk menopang penerapan E Government dan komunikasi publik, diperlukan insfrastruktur yang memadai. Baik itu infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi maupun infrastruktur komunikasi publik

4. **Peningkatan kompetensi tenaga TIK dan komunikasi publik.**

Untuk mendukung E Government, penerapan TIK serta pelayanan informasi publik, pada setiap SKPD/OPD diperlukan tenaga khusus yang memiliki kompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan komunikasi publik. Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil negara diperlukan mengingat ketersediaan aparatur yang memiliki kompetensi sebagaimana tersebut di atas masih minim.

5. **Pemberdayaan Masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Kesadaran dan kemampuan masyarakat terhadap TIK merupakan keniscayaan untuk mendukung E Government dan Keterbukaan Informasi Publik. Di setiap kelompok masyarakat perlu dikembangkan simpul-simpul untuk mengedukasi komunitasnya masing-masing dalam TIK. Dengan demikian, jaringan infrastuktur TIK yang ada bisa dioptimalisi untuk kegiatan-kegiatan yang edukative dan produktif.

1. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2018 merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja selama tahun 2018. Capaian kinerja 2018 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang disusun pada awal tahun anggaran.

Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2018 merupakan jabaran dari Rencana Strategik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021. Indikator yang ditetapkan atas Rencana Kinerja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang dilakukan atas dasar Rencana Kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. GAMBARAN UMUM
- B. LINGKUNGAN STRATEGIS
- C. TUJUAN DAN MANFAAT LKJiP
- D. PERMASALAHAN DAN ISSU STRATEGIS
- E. SISTIMATIKA PENYAJIAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

Visi, merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan visi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih periode 2016-2021 yang telah ditetapkan sebagai visi Kabupaten Pemalang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

1. Visi

Visi Kabupaten Pemalang untuk lima tahun ke depan adalah :

“ Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera.”

Penjelasan Visi :

Dalam visi tersebut di atas terdapat empat gagasan pokok yang menjiwai seluruh gerak dan proses pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pemalang, yaitu :

- a. **Pemalang Hebat**, Terwujudnya Pemalang Hebat merupakan suatu kondisi dimana harapan, keinginan, cita-cita yang diharapkan menjadi ada. Pemalang Hebat merupakan *ultimate goal* yang dicita-citakan dan yang dibangun dari kondisi Pemalang yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera. **Pemalang Hebat** juga menjadi *tagline* pembangunan daerah dalam memacu semangat, percepatan

dan sinergitas para *stakeholders* terkait dalam mengupayakan perwujudan pembangunan Pemalang.

- b. **Berdaulat** diartikan sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat Pemalang yang mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong, dengantetap memperhatikan sinergitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan supremasi hukum.
- c. **Berjatidiri** diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang memiliki keunggulan yang berbasis *local wisdom/local value* dengan menumbuhkan kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati.
- d. **Mandiri** diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki, meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal.
- e. **Sejahtera** diartikan sebagai kondisi masyarakat Pemalang yang berkualitas, peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang didukung daya saing masyarakat dan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Misi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Bupati Pemalang. Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung keseluruhan Misi Kabupaten Pemalang.

Pencapaian Visi "Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera", ditempuh melalui 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah, mufakat dan gotong royong
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak
- c. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumber daya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar yang merata serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan daya saing daerah
- e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati
- f. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum kemudahan investasi dan daya saing daerah
- g. Menumbuhkan kembali Budaya Asli Daerah Kabupaten Pematang sebagai landasan pembentukan jati diri Pematang untuk memperkokoh kepribadian bangsa

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Perumusan program pembangunan daerah merupakan inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis pembangunan Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas.

Program pembangunan daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021 merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah merupakan pernyataan yang merupakan program kepala daerah Kabupaten Pematang yang berisi program prioritas yang bersifat strategis, yang terdiri dari:

1. Peningkatan Infrastruktur Pendidikan
2. Pendirian Rumah Sakit Pratama di Comal dan Randudongkal
3. Pembangunan Kawasan Wisata

- a. Mangrove di Mojo Ulujami
 - b. Pengembangan Wisata Susur Sungai Comal
 - c. Pemandian Moga, dengan infrastruktur pendukung.
 - d. Desa Wisata (Cikendung, Sikasur, Gombong, Banyumudal, Sima, Kaliprau, Mojo, Pegongsoran, Penggarit, Nyamplungsari, Blendung, Kertosari, Pedagung, dan Desa Surajaya)
 - e. Pembangunan Wisata Edukasi Gardu Pandang Gunung Slamet
4. Pendirian Pusat Layanan Usaha Terpadu
 5. Pengembangan Agropolitan:
 - a. Agropolitan Durian (Warungpring),
 - b. Agropolitan Mangga Istana (Asem Doyong, Penggarit, Widuri, Danasari)
 - c. Nanas (Waliksarimadu)
 6. Budidaya Padi Teknologi Salibu (Ampelgading)
 7. Pengembangan Minapolitan
 - a. Tasikrejo, Kaliprau, Ketapang, Mojo, Pesantren, Limbangan (Kec. Ulujami)
 - b. Lawangrejo, Sugihwaras (Kec. Pemalang)
 8. Pengembangan Kawasan Pedesaan (Waliksarimadu)
 9. Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kerbau di Desa Peguyangan, Kec. Bantarbolang dan SPR Sapi Potong di Kecamatan Watukumpul dan Belik.
 10. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan di Desa Nyamplung Sari dan Mojo
 11. RTH di masing-masing Kecamatan dengan kelengkapan *Hotspot area*.
 12. Pengembangan Peternakan di Kawasan Penghasil Telur Omega (Klarean, Sarwodadi)
 13. Pembangunan pasar pagi dan pasar unggas.
 14. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah
 15. Pengembangan BLK dan Pembangunan Technopark
 16. Pembangunan Masjid Agung Pemalang
 17. Revitalisasi Pasar-pasar daerah
 18. Pembangunan jalan-jalan beton (*Rigid Pavement*)
 19. Penataan Ibukota Kabupaten dan Kecamatan.
 20. Pembangunan PLTU Kabupaten Pemalang

21. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
22. Pembangunan Pusat Pengembangan Informatika dan Desa (PUSPINDES)
23. Pembangunan Bandara Perintis.
24. Pembangunan Gedung DPRD
25. Pembangunan Rumah Budaya
26. Penyediaan Air Bersih
27. Pembangunan *Sport Centre*

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Bupati Pemalang. Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung pencapaian visi dan keseluruhan Misi Kabupaten Pemalang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Pemalang 2016-2021, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika sejalan dengan ***misi yang ke 1 (satu)*** yaitu *Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah, mufakat, dan gotong royong* dan ***misi yang ke 6 (Enam)*** yaitu *Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik, penegakan supermasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.*

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang, dinas Komunikasi dan Informatika melalui program:

1. Progam Fasilitasi Peningkatkan SDM bidang Komunikasi dan Informasi.
2. Progam Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah.
3. Progam Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informasi.
4. Progam Kerjasama Informasi dengan Media Massa.
5. Progam Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah .
6. Program Pengembangan Persandian/Informasi Daerah.
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
10. Progam Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

11. Program Peningkatan Displin Aparatur.
12. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

2. Tujuan dan Sasaran Organisasi

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sedangkan sasaran sebagai penjabaran dari tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Rumusan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang terkait dengan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjati diri, Mandiri dan Sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
MISI 1 : Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong			
1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur perencanaan mengenai perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja pembangunan daerah	Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta penyusunan berbagai laporan kinerja sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan
MISI 6 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah			
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik	1. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;	a. Pengembangan kapasitas, kualitas, dan etos kerja aparatur; b. Pengembangan dan penerapan regulasi secara konsisten	Peningkatan penerapan reformasi birokrasi secara baik menuju pemerintahan yang baik dan bersih

VISI : Terwujudnya Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjati diri, Mandiri dan Sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
		dan menyeluruh	
	2. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Penerapan SPP, maklumat pelayanan, dan pengukuran kepuasan masyarakat diprioritaskan pada SKPD yang melakukan pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik terutama pada PD yang melakukan pelayanan publik
	3. Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informasi guna menunjang pelayanan public	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	

Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran sebagai penentuan langkah-langkah yang lebih operasional. Tujuan dan Sasaran merupakan kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang.

Adapun Tujuan dan sasaran Program Prioritas Daerah yang diamanatkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Tabel.2.2

Tujuan dan sasaran Program Prioritas Daerah
Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Tujuan	Sasaran	Indikasi sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kualitas jaringan telekomunikasi dan Informatika guna menunjang pelayanan publik	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	Cakupan pelayanan TI bagi masyarakat	Titik Hot spot	Na	3	6	9	12	14	14

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menjabarkannya ke dalam tujuan dan sasaran SKPD untuk mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah. Adapun Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dapat di dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Tujuan, sasaran dan Indikator Dinas Kominfo 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	TARGET KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	- Nilai LKJIP	C	C	C	B	B
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik	- Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	40	60	80	100	100
		- Pemeringkatan keterbukaan informasi publik	16	14	14	12	10
		- Tingkat pemenuhan informasi publik pada website pemalang kab.go.id	50	70	80	90	100
	Meningkatnya kualitas aparatur di bidang komunikasi informatika	Prosentase aparatur sipil yang trampil di bidang komunikasi dan informatika	20	40	60	70	80

	Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya di Mata Publik	- Rasio berita positif dan negatif di media mainstream tentang Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya	60:40	70:30	80:20	90:10	95:5
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	- Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi literasi media	12	14	14	14	14
Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik	Terwujudnya pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.	- Tersedianya data center dan NOC dengan berstandar - Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Pemenuhan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	20 Na 20	40 3 40	60 3 60	80 3 70	100 3 80
	Terintegrasinya data antar seluruh SKPD/OPD	- Prosentase ketersediaan data statistik terintegrasi	Na	40	60	80	90

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	TARGET KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)					
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra public	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik	- Pemeringkatan keterbukaan informasi publik	16	14	14	12	10
		- Tingkat pemenuhan informasi publik pada website pemalang kab.go.id	50	70	80	90	100
		- Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara on line yang ditindaklanjuti tepat waktu	40	60	80	90	100
	Meningkatnya kualitas aparatur di bidang komunikasi informatika	Prosentase aparatur sipil yang trampil di bidang komunikasi dan informatika	20	40	60	70	80
Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik	Terwujudnya pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.	- Tersedianya data center dan NOC dengan berstandar	20	40	60	80	100
		- Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Na	3	3	3	3
		- Pemenuhan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Na	40	60	70	80
	Terintegrasinya data antar seluruh SKPD/OPD	- Prosentase ketersediaan data statistik terintegrasi	Na	40	60	80	90

2.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara itu kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan, strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD Kabupaten Pematang Jaya yang menjadi tugas dan fungsi Strategi dan Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya 5 (lima) tahun kedepan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Berdasarkan analisis dari pembobotan dengan menggunakan metode profesional judgement, maka terdapat 4 (empat) strategi pilihan yakni sebagai berikut:

1. Menerapkan tata kelola E Government dan meningkatkan kualitas Pelayanan Informasi dan aspirasi Publik.
2. Mengintegrasikan data TIK dan data pelayanan publik.
3. Membangun infrastruktur jaringan TIK dan komunikasi publik.
4. Memperkuat kualitas aparatur di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Pemberdayaan masyarakat di bidang informasi dan komunikasi

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian kinerja Tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Perjanjian Kinerja meliputi 7 (tujuh) sasaran Strategis dan 11 Indikator kinerja dengan targetnya dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel. 2.5

**Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan (%)	Targ et	Penga mpu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LkjIP	nilai	C	
2.	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik.	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	persen	60	Bid. Bid.PIK P
		Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	peringkat	14	Bid.PIK P
		Tingkat Pemenuhan Informasi Publik pada Website pemalangkab.go.id dan website Perangkat Daerah	persen	60	Bidang PIKP
3.	Memperkuat kualitas Aparat Komunikasi Informatika.	Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang komunikasi dan informatika	Persen	60	Bid PIKP, Postel. P E-Gov
4.	Terwujudnya pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Tersedianya Data Center dan NOC dengan berstandar	persen	60	Bid. P E-Gov
		Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks PEGI)	nilai	3	Bid. P E-Gov
		Pemenuhan Sistem manajemen Pengamanan Informasi	Persen	40	Bid. Postel
5.	Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di Mata Publik	Rasio berita positif dan negatif di media mainstream tentang Pemerintah Kabupaten Pemalang	rasio	70:30	Bid PIKP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan (%)	Target	Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
6.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi public	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi literasi media	kelompok	14	Bid PIKP
7.	Terintegrasinya data SKPD/OPD	Prosentase ketersediaan data Statistik terintegrasi	persen	60	Bid Postel

Selanjutnya dari indikator Sasaran Strategis yang telah disebutkan di atas tadi, dipilih beberapa indikator sebagai Indikator kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang sebagai berikut pada tabel 2.6

Tabel 2.6

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan (%)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik.	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	persen	60
		Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	peringkat	14
		Tingkat Pemenuhan Informasi Publik pada Website pemalangkab.go.id	Persen	70
	Memperkuat kualitas Aparat Komunikasi Informatika.	Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang komunikasi dan informatika	Persen	60
	Terwujudnya pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Tersedianya Data Center dan NOC dengan berstandar	persen	60
		Penilaian sistem pemerintahan berbasis elektronik	Nilai	3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan (%)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik.	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	persen	60
		Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	peringkat	14
		Tingkat Pemenuhan Informasi Publik pada Website pemalangkab.go.id	Persen	70
	Memperkuat kualitas Aparat Komunikasi Informatika.	Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang komunikasi dan informatika	Persen	60
		Pemenuhan sistem manajemen pengamanan informasi	sertifikat	40
	Terintegrasinya data SKPD/OPD	Prosentase ketersediaan data Statistik terintegrasi	persen	60

Adapun program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2018 sejumlah 12 program dengan anggaran yang tersedia sebagaimana pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
PROGRAM DAN ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)		
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 999.772.750,00	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.150.924.250,00	APBD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 242.545.000,00	APBD
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 50.225.000,00	APBD
5.	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Rp. 137.553.000,00	APBD
6.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp. 6.740.350.000,00	APBD
7.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Rp. 177.960.000,00	APBD
8.	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Rp. 1.215.644.000,00	APBD
9.	Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	Rp. 968.309.000,00	APBD
10.	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	Rp. 2.976.717.000,00	APBD
11.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Rp. 550.000.000,00	APBD
12.	Program Pengembangan data/Informasi Persandian	Rp. 763.000.000,00	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja, perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan.

Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output) dan Hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut :

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) yang merupakan gambaran mengenai kinerja yang diinginkan. Skala pengukuran kinerja setiap indikator dalam laporan kinerja ini dikategorikan ke dalam empat kategori sebagai berikut:

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
II	75 % sampai 100 %	Baik
III	55 % sampai 75 %	Cukup
IV	Kurang dari 55 %	Kurang

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

1. Pencapaian Kinerja Program Prioritas Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2018			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2017 terhadap Target Akhir 2021
			2016	2017	Target	Capaian	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	Cakupan pelayanan TI bagi masyarakat	Na	4	9	10	111 %	14	71%

Pencapaian target program prioritas daerah tahun 2018 yakni cakupan layanan TI bagi masyarakat dengan target jumlah titik hotspot yang terbangun 9 titik pada tahun 2018 telah tercapai 10 titik atau 111%. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD yakni Tahun 2020, maka telah tercapai 71%. Adapun hotspot area yang telah terbangun yakni, di RTH Patih Sampun, RTH Comal, Gandulan Cullinary Center, Alun-alun Moga, Randudongkal, Pulosari, Widuri. Adapun yang hanya jaringannya saja, Ulujami, Bodeh, Belik.

2. Pencapaian Target Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan capaian kinerja sasaran adalah 74,5 % (cukup). Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
PENCAPAIAN SASARAN KINERJA TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis	Nilai Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Na

No	Sasaran Strategis	Nilai Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Na
.2	.Meningkatnya layanan informasi dan Aspirasi Publik	67%
3.	Memperkuat kualitas aparatur komunikasi dan informatika	84 %
4.	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.	72 %
5	Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di Mata Publik	70%
6.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi public	64%
7.	Terintegrasinya data antar seluruh SKPD/OPD	90%

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang beserta target dan capaian realisasi kinerja dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2018			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2017 terhadap Target Akhir 2021
			2016	2017	Target	Capaian	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LKjIP	Na	Na	C	Na	-	B	-

Tahun 2018, LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Pemalang belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang, sehingga untuk pencapaian nilai LKjip tahun 2017 belum ada hasilnya

Sasaran 2 : Meningkatkan Layanan Informasi dan Aspirasi Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2018			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2018 terhadap Target Akhir 2021
			2016	2017	Target	Capaian	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
.	Meningkatnya layanan informasi dan Aspirasi Publik	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Jawa Tengah	33	16	14	17	82%	100	58%
		Tingkat Pemenuhan Informasi Publik pada Website Pemalangkab.go.id dan sub domainnya	20	40	70	23	33%	100	23%
		Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	20	40	60	52	86%	100	52%

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik. Tahun 2018 ditetapkan target peringkat ke 14 tingkat Provinsi Jawa Tengah, dan realisasinya peringkat ke 17 atau 82% dari target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan target pada akhir Tahun Renstra yakni peringkat ke 10, maka realisasinya baru 33 %. Kabupaten Pemalang dengan peringkat ke-17 mendapatkan predikat cukup informatif dalam pelayanan informasi kepada masyarakat.

Tingkat pemenuhan informasi publik pada website pemalangkab.go.id pada tahun 2018 ditetapkan 70%. Dan realisasinya baru mencapai 23%. dari target yang ditetapkan. Tingkat pemenuhan informasi publik dihitung dari domain website pemalangkab.go.id dan sub domain website perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan. Jumlah website perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan ada 60 buah. Dari 60 website yang ada, yang aktif hanya 40, dan 20 website pada tahun 2018 tidak aktif. Dan dari 40 website yang aktif, baru 14 website yang sudah

menampilkan Daftar Informasi Publik (DIP). Sisanya sejumlah 26 website belum menampilkan Daftar Informasi Publik.

Jumlah aduan masyarakat Kabupaten Pemalang melalui sarana "HALLO BUPATI" selama periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2018 sejumlah 191 aduan. Dari 191 aduan tersebut sejumlah 100 aduan (52%) telah ditindaklanjuti dan 91 aduan belum ditindaklanjuti. Semua aduan yang masuk telah direspon melalui aplikasi dan diteruskan kepada Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dan Tupoksi sesuai dengan aduan yang masuk. Namun demikian masih ada 48 % aduan yang belum ditindaklanjuti disebabkan karena respon dari Perangkat Daerah yang masih kurang.

Adapun rekapitulasi aduan masyarakat Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
REKAP PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI HALLO BUPATI PER
BULAN TAHUN 2018

No.	Bulan	Jumlah	Terjawab	Tidak
1.	Januari	52	20	22
2.	Februari	38	14	24
3.	Maret	27	9	18
4.	April	11	4	7
5.	Mei	12	4	8
6.	Juni	5	3	2
7.	Juli	0	0	0
8.	Agustus	0	0	0
9.	September	20	20	0
10.	Oktober	10	10	0
11.	November	11	11	0
12.	Desember	5	5	0
		191	100	91

Tabel. 3.3

DAFTAR REKAPITULASI ADUAN MASYARAKAT
HALO BUPATI PEMALANG TAHUN 2018

NO	JENIS ADUAN	JUMLAH ADUAN	ADUAN YG TERJAWAB	ADUAN YANG TIDAK TERJAWAB
1	LAYANAN PUBLIK	12	8	4
2	INFRASTRUKTUR	19	16	3
3	LAIN-LAIN	45	8	37
4	KESEHATAN	17	10	7
5	PENDIDIKAN	11	6	5
6	PEMERINTAHAN			0
7	KEAMANAN/KETERTIBAN	22	5	17
8	TRANSPORTASI			0
9	EKONOMI/UKM	1	1	0
10	BANSOS	6	5	1
11	PERTANIAN			0
12	TENAGA KERJA	2	2	0
13	BUDAYA	1	1	0
14	OLAH RAGA	4	1	3
15	PARIWISATA	1	1	0
16	KEAGAMAAN	2	1	1
17	BENCANA			0
18	LINGKUNGAN HIDUP	7	5	2
19	PERHUBUNGAN	7	6	1
20	PERIJINAN	9	5	4
21	KEPEGAWAIAN	15	7	8
22	KEPENDUDUKAN	9	6	3
23	PARKIR	1	1	0
	JUMLAH	191	95	96

Adapun kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

- a. Pengelolaan dan Inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah.
- b. Revitalisasi pendayagunaan media center daerah
- c. Penguatan Komunikasi Publik melalui website dan SMS Center

Sasaran 3: Memperkuat Sumber Daya Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun	Tahun 2018	Target Akhir	% Capaian s/d 2017
----	-------------------	-------------------	---------------	------------	--------------	--------------------

			2015	2016	Target	Capaian	%	Renstra	terhadap Target Akhir 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Memperkuat Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang komunikasi dan informatika	Na	Na	60	50	83%	80%	82%

Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang komunikasi dan Informatika merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran memperkuat kualitas aparatur komunikasi dan Informatika. Target tahun 2018 sebesar 60 % dan realisasi 50 % atau 83%.

Adapun kegiatan yang mendukung sasaran ini antara lain:

- a. Asistensi/Bimbingan Teknis Bidang Jurnalistik
- b. Sosialisasi Kehumasan
- c. Bimbingan Teknis Bidang Analisis data
- d. Pengelolaan dan Inventarisasi data dan Penyajian Informasi Kebijakan Pemerintah daerah

Sasaran 4 : Terwujudnya pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2018			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2018 terhadap Target Akhir 2021
			2016	2017	Target	Capaian	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Terwujudnya pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Data Center dan NOC dengan berstandar	20	40	60%	40%	67%	80%	69%
		Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Na	Na	3	3	100%	3	100%
		Pemenuhan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Na	Na	40	20	50%	80	25%

Untuk mencapai sasaran kedua yakni Terwujudnya pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, diukur dari tiga indikator yakni, Tersedianya Data Center dengan NOC berstandar, Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Pemenuhan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Dari target sasaran yang ditetapkan terealisasi sebesar 50 %.

Tersedianya data center dengan NOC berstandar merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan sarana dan prasarana (Infrastruktur) komunikasi dan informatika. Tahun 2018 ditetapkan target 60%. Dari target yang ditetapkan terealisasi 40% . Dengan demikian untuk target tersedianya data center dengan NOC berstandar, realisasinya 67%. Apabila dibandingkan dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 yakni 80%, maka capaian tahun 2018 maka capaiannya masih 69 %.

Penilaian Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauhmana implementasi E-Government di Kabupaten Pematang Jaya, dilihat dari ketersediaan infrastruktur baik lunak maupun keras, ketersediaan aplikasi. Sebelum ada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, penilaiannya disebut dengan indeks E-Government Indonesia atau Indeks PEGI (Penilaian E- Government Indonesia). Tahun 2018 target yang ditetapkan mendapatkan nilai 3 dan mendapatkan nilai 3, sehingga realisasinya 100%. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra yakni 3, maka capaiannya sudah 100%.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi komunikasi dan informatika guna memberikan pelayanan kepada pengguna layanan SPBE. Tujuan SPBE adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, dan meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan SPBE. Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik ada 4 yakni:

1. Government to Government
2. Government to Bussines
3. Government to Community
4. Government to

Ruang Lingkup SPBE ada 6 yakni

1. Tata kelola SPBE

2. Manajemen SPBE
3. Audit TIK
4. Penyelenggaraan SPBE
5. Percepatan SPBE
6. Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Pemenuhan Standar Manajemen Pengamanan Informasi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keamanan informasi pemerintah daerah. Pada Tahun 2018 ditetapkan target sebesar 40%, dan realisasinya 20 % atau 50 % dari target. Dan dibandingkan dengan target akhir Renstra 80%, maka capaiannya baru 25%.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, penilaian dalam indeks Keamanan Informasi dilakukan dengan cakupan keseluruhan persyaratan pengamanan yang tercantum dalam standar ISO/IEC 27001:2009, yang disusun menjadi 5 (lima) area yakni:

1. Tata Kelola Keamanan Informasi
Bagian ini mengevaluasi kesiapan bentuk tata kelola keamanan informasi beserta instansi /fungsi, tugas dan tanggungjawab pengelola keamanan informasi
2. Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi
Mengevaluasi kesiapan penerapan pengelolaan resiko keamanan informasi sebagai dasar penerapan strategi keamanan informasi
3. Kerangka Kerja Keamanan Informasi
Mengevaluasi kelengkapan dan kesiapan kerangka kerja (kebijakan dan prosedur) pengelolaan keamanan informasi dan strategi penerapannya
4. Pengelolaan Asset Informasi
Mengevaluasi kelengkapan pengamanan terhadap asset informasi termasuk keseluruhan siklus penggunaan asset tersebut
5. Teknologi dan Keamanan Informasi
Mengevaluasi kelengkapan konsistensi dan efektifitas penggunaan teknologi dalam pengamanan asset informasi
Berdasarkan hasil Asseso yang dilakukan oleh BSSN dan Studi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pematang

bekerjasama dengan PT Pilar Teknotama Yogyakarta, didapatkan informasi bahwa system Manajemen Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Pemalang belum sepenuhnya diterapkan untuk memenuhi kriteria atau acuan indeks KAMI dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016.

Adapun Kegiatan yang mendukung indikator sasaran ini adalah:

1. Fasilitasi Pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
2. Penyelenggaraan ekosistem smart city
3. Pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi berbagai pakai
4. Pengelolaan nama domain dan sub domain daerah
5. Pengelolaan infrastruktur e-government, data dan informasi terintegrasi
6. Pengamanan komunikasi dan informasi
7. Penyelenggaraan keamanan informasi

Sasaran 5 : Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di mata Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2017			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2017 terhadap Target Akhir 2021
			2015	2016	Target	Capaian	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di mata Publik	Rasio berita positif dan negative di media mainstream tentang Kabupaten Pemalang	Na	Na	70:30	60:40	70%	95:5	50%

Rasio berita positif dan negative di media mainstream tentang Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Jumlah Media Informasi milik Pemda yang dikelola merupakan indikator yang ditetapkan untuk pencapaian sasaran Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di mata Publik. Tahun 2018 ditetapkan target Rasio berita positif dan negative di media mainstream tentang Pemerintah Kabupaten Pemalang 73:40 % dan realisasi 60:40 atau 70%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2021 yakni 95:5 maka realisasinya baru 50 %.

Kegiatan yang mendukung sasaran ini antara lain:

1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Sasaran 6: Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi public

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2017			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2017 terhadap Target Akhir 2021
			2015	2016	Target	Capaian	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi literasi media	Na	Na	14	15	107%	14	107%

Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi literasi media merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi public. Target yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah 14 kelompok berbasis kecamatan. Realisasi baru ada 9 kecamatan yang telah terbentuk KIM atau 64 %. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 akhir Renstra yakni 14 kelompok, maka realisasinya telah mencapai 64 %.

Jumlah kelompok informasi masyarakat yang ada di kabupaten Pemalang pada tahun 2018 ada 15 kelompok. Tersebar di 9 kecamatan. Adapun daftar nama Kelompok Informasi Masyarakat di kabupaten Pemalang sebagai berikut:

DAFTAR LEMBAGA KOMUNIKASI MASYARAKAT (LKM) / KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) KABUPATEN PEMALANG

NO	NAMA LKM/ KIM	ALAMAT ORGANISASI	NAMA	JULAH PENGURUS	
				PRIA	WANITA
1	LKM	Desa Pegongsoran Kecamatan Pemalang	Melati	11	4
2	LKM	Desa Kramat Kecamatan Pemalang	Mawar	13	2
3	LKM	Desa Sungapan Kecamatan	Dahlia	7	8

		Pemalang			
4	KIM	Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang		9	5
5	LKM	Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman	Mawar	12	3
6	LKM	Desa Banjardawa Kecamatan Taman	Anggrek	13	2
7	KIM	Kelurahan Beji Kecamatan Taman		14	1
8	LKM	Desa Nyamplungsari Kecamatan Petarukan	Melati	16	3
9	KIM	Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan		14	3
10	KIM	Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading	Mandiri	10	3
11	KIM	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		18	2
12	KIM	Desa Sidorejo Kecamatan Comal	Bluger	7	0
13	LKM	Desa Pamutih Kecamatan Ulujami	Mawar	0	15
14	KIM	Desa Bodeh Kecamatan Bodeh		8	1
15	LKM	Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang	Anggrek	9	2

Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi Publik.

Sasaran 7 : Terintegrasinya Data Antar SKPD/ OPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2018			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2017 terhadap Target Akhir 2021
			2015	2016	Target	Capaian	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Terintegrasinya Data Antar SKPD/ OPD	Prosentase ketersediaan data Statistik terintegrasi	Na	Na	60	55	90	100	55%

Prosentase data antar SKPD/ O data PD yang terintegrasi merupakan indikator yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya sasaran Terintegrasinya data SKPD/OPD. Indikator Prosentase data antar SKPD/ OPD yang terintegrasi tahun 2018 ditetapkan target 60% dan realisasinya 55% atau 90%, Indikator Jumlah dokumen (Kabupaten dalam angka, Kecamatan dalam angka, PDRB kecamatan, Indeks Harga Konsumen dan laju inflasi, NTP Kabupaten Pemalang, Indikator penting pembangunan daerah Kabupaten Pemalang) tahun 2018 target 6 dokumen dan realisasinya 6 dokumen atau 100%. Pada tahun 2018, telah disusun Metadata Pembangunan sebagai panduan bagi produsen data di dalam mengukur data indikator pembangunan. Dan aplikasi Pemalang Dalam Genggaman berbasis android dan web.

Adapun kegiatan yang mendukung tercapainya indikator sasaran tersebut di atas antara lain adalah Penyusunan dan Pengumpulan data statistik daerah dan Pengelolaan Data Statistik Daerah.

B. REALISASI ANGGARAN

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Belanja Tidak Langsung	
	a. Belanja Pegawai	4.560.124.500,-
2.	Belanja Langsung	
	a. Belanja Pegawai	859.465.000,-
	b. Belanja Barang dan Jasa	10.691.615.501,-

c.Belanja Modal	3.367.829.554,-
-----------------	-----------------

Untuk Realisasi Belanja Langsung dapat kami rinci sebagai berikut :

No.	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN		%
		TARGET	REALISASI	
	DISKOMINFO			
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
A	Penyediaan jasa surat menyurat	44.400.000,-	40.661.369,-	91,58
B	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	191.400.000,-	149.829.203,-	78,28
C	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15.000.000,-	12.264.475,-	81,76
D	Penyediaan jasa administrasi keuangan	74.425.000,-	73.539.896,-	98,81
E	Penyediaan jasa kebersihan kantor	9.000.000,-	8.950.000,-	99,44
F	Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000,-	29.988.000,-	99,96
G	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.000.000,-	29.983.800,-	99,95
H	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000,-	18.720.000,-	93,60
I	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	27.900.000,-	25.893.200,-	92,81
J	Penyediaan makanan dan	30.000.000,-	29.912.500,-	99,71

	minuman			
K	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	200.000.000,-	198.944.136,-	99,47
L	Penyediaan Jasa Keamanan	4.900.000,-	4.900.000,-	100,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
A	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	81.100.000,-	78.400.000,-	96,67
B	Pengadaan mebeleur	87.500.000,-	84.765.000,-	96,87
C	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	97.391.000,-	92.447.500,-	94,92
D	Pengadaan alat- alat elektronik	66.100.000,-	61.005.000,-	92,29
E	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	73.620.000,-	62.350.000,-	84,69
F	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	36.000.000,-	35.720.580,-	99,22
G	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	97.757.000,-	96.216.500,-	98,42
h	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	35.000.000,-	16.260.000,-	46,46
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
A	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	35.000.000,-	25.762.500,-	73,61
B	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100.000.000,-	88.567.875,-	88,57

C	Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi	107.545.000,-	75.472.046,-	70,18
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
A	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12.325.000,-	11.865.000,-	96,27
B	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	5.000.000,-	4.902.500,-	98,05
C	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.000.000,-	4.997.500,-	99,95
D	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	27.900.000,-	26.212.500,-	93,95
V	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD			
A	Penyusunan data base perencanaan SKPD	103.103.000,-	96.581.468,-	93,67
B	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	34.450.000,-	28.827.500,-	83,68
VI	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
A	Fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	250.000.000,-	233.222.377,-	93,29
B	Penyelenggaraan ekosistem Smart City	4.152.500.000,-	3.933.109.217,-	94,72

C	Pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi berbagi pakai	688.375.000,-	675.154.015,-	98,08
D	Pengelolaan nama domain dan sub domain daerah	426.625.000,-	421.947.342,-	98,90
E	Pengelolaan infrastruktur e-government, data dan informasi terintegrasi	1.048.900.000,-	982.461.037,-	93,67
F	Pengadaan alat studio dan komunikasi	111.950.000,-	102.750.000,-	91,78
G	Pemeliharaan alat studio dan komunikasi	62.000.000,-	55.045.000,-	88,78
VII	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi			
A	Asistensi/bimbingan teknis bidang teknik jurnalistik	41.405.000,-	21.807.100,-	52,67
B	Sosialisasi kehumasan bagi aparatur pemerintah kabupaten pematang	86.555.000,-	73.363.546,-	84,76
D	Asistensi/bimbingan teknis bidang analisis data	50.000.000,-	43.387.600,-	86,78
VIII	Program kerjasama informasi dengan mas media			
A	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	721.183.000,-	691.745.259,-	95,92
b	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	464.475.000,-	432.961.000,-	93,22
C	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	29.986.000,-	26.857.024,-	89,57
IX	Program penguatan			

	kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah			
A	Revitalisasi pendayagunaan media center daerah	96.147.000,-	64.087.149,-	66,66
B	Penguatan komunikasi publik melalui website dan SMS center	167.100.000,-	144.940.000,-	86,74
C	Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi public	57.562.000,-	38.451.900,-	66,80
D	Penyelenggaraan Government CIO	445.000.000,-	417.122.421,-	93,74
E	Pemberdayaan dan pemanfaatan e-government	202.500.000,-	183.135.000,-	90,44
X	Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika			
A	Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baleho dll	417.375.000,-	384.681.000,-	92,17
B	Dokumentasi dan publikasi program/ kegiatan SKPD	660.737.000,-	647.900.144,-	98,00
c	Pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (adventorial)	874.665.000,-	835.189.000,-	95,49
D	Komunikasi publik melalui dialog interaktif, radio dan televisi	239.085.000,-	154.462.000,-	64,61
E	Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah	394.855.000,-	357.340.852,-	90,50

	daerah			
F	Pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk masyarakat	390.000.000,-	339.142.262,-	86,96
	STATISTIK			
I	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			
A	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	450.000.000	442.480.960,-	98,33
B	Pengelolaan data statistik daerah	100.000.000,-	93.239.914,-	93,24
	PERSANDIAN			
II	Program pengembangan persandian/informasi daerah			
A	Pengamanan komunikasi dan informasi	220.000.000,-	208.884.463,-	94,95
B	Penyelenggaraan kemananan informasi	543.000.000,-	519.795.925,-	95,73

BAB IV PENUTUP

Dalam tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Pemalang tahun 2018 yang menguraikan keberhasilan/kegagalan yang dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang telah menetapkan 6 sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja dari ke 6 (enam) sasaran adalah sebesar 74,5%. Secara umum kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2018 dapat dikategorikan cukup baik.

Beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang ke depan antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas jaringan komunikasi dan Informatika melalui penyediaan jaringan Fiber Optik.
- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik melalui penyediaan konten informasi yang berkualitas
- c. Meningkatkan Ketersediaan data statistik yang terintegrasi
- d. Meningkatkan keamanan informasi Pemerintah Kabupaten Pemalang

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG



Drs.NUGROHO BUDI RAHARJO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610821 198903 1 003